

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN GEDANGANAK

Fajar Madjid Ramadhan, Endang Larasati Setianingsih, Dyah Lituhayu



Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kontak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Slum settlements are a common problem that occurs in urban areas, these problems are closely related to population growth and population density, both aspects cause an increase in the number of residents which has an impact on the increasing need for housing. The imbalance of land with the needs of the population causes the emergence of dense and uninhabitable settlements. To that end, the Ministry of Public Works and Housing has implemented a policy for alleviating slums through the City Without Slums Program (KOTAKU), the program on a national scale, one of which is the City Without Slums Program in Gedanganak Village. This study aims to describe and analyze the implementation of the program as well as the driving factors and inhibiting factors for the implementation of the KOTAKU Program in Gedanganak Village. The research method used in this research is descriptive through a qualitative approach using primary and secondary data sources. In conducting research, researchers describe and describe more deeply the stages of program implementation which include the preparation stage, planning stage, implementation stage, and sustainability stage. The research was then analyzed using the Atlas.ti software tool, the results showed that the implementation of the KOTAKU Program in Gedanganak Village had been going quite well, but there were still some things that could be maximized, especially at the preparation stage, and the sustainability stage. The factors that support and hinder the implementation of the program are resources, community participation, and the attitude of the implementor.

Keywords: slum settlements, program KOTAKU, Gedanganak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berpotensi terhadap permasalahan kepadatan penduduk dan kualitas lingkungan karena didukung dengan jumlah penduduk yang mencapai 265 juta jiwa. Indonesia menempati peringkat keempat dalam ranking jumlah penduduk terbesar di dunia. Kawasan permukiman kumuh termasuk dalam masalah penting yang harus segera diselesaikan. Target Kementerian PUPR mengenai penanganan permukiman kumuh yaitu mengurangi jumlah luasan permukiman kumuh Indonesia yang terhitung pada tahun 2014 mencapai 38.431 Ha. Penyelesaian permukiman kumuh ini dilakukan melalui perbaikan infrastruktur lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam perkembangan suatu daerah, pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol memicu timbulnya masalah terutama pada Kawasan permukiman. Pertumbuhan penduduk yang tidak dimbangi tersediannya lahan permukiman akan menimbulkan ketidakseimbangan yang mengakibatkan pembangunan

tempat tinggal yang tidak layak dan berhimpitan hingga menjadi permukiman kumuh. Permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No 2 tahun 2016, Permukiman kumuh adalah wilayah permukiman yang tidak layak huni karena kualitas bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi dan bangunan tidak memenuhi syarat bangunan layak huni.

Pertumbuhan penduduk merupakan suatu masalah umum yang terjadi di setiap kota terutama kota-kota besar, fenomena pertumbuhan penduduk yang ada di kota besar biasanya dianggap menjadi masalah apabila menyebabkan lingkungan menjadi kumuh atau sulitnya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak. Peningkatan jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh mobilisasi masyarakat yang berpindah dari desa ke kota untuk menjadi perantau dan akhirnya menetap. Berikut data kependudukan di Kabupaten Semarang Tahun 2020 :

Tabel 1. Data Kependudukan Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1	Getasan	65,796	52.932	804,5
2	Tengaran	47,296	71.966	1521,6
3	Susukan	48,865	49.545	1013,9
4	Kaliwungu	29,95	30.311	1012,1
5	Suruh	64,015	70.088	1094,9
6	Pabelan	47,975	44.457	926,7
7	Tuntang	56,242	68.700	1221,5
8	Banyubiru	54,415	44.294	814,0
9	Jambu	51,627	40.642	787,2
10	Sumowono	55,63	33.967	610,6
11	Ambarawa	28,221	63.753	2259,1
12	Bandungan	48,233	58.799	1219,1
13	Bawen	46,57	59.675	1281,4
14	Bringin	61,891	46.441	750,4
15	Bancak	43,846	23.888	544,8
16	Pringapus	78,352	56.885	726,0
17	Bergas	47,332	75.910	1603,8
18	Ungaran Barat	35,96	81.074	2254,6
19	Ungaran Timur	37,992	79.767	2099,6
Jumlah		950,207	1.053.094	1108,3

Sumber : Kabupaten Semarang dalam Angka 2021

Lokasi dan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Semarang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 59/0473/2020 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Semarang, menyebutkan kawasan kumuh menjadi kewenangan DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Semarang, berikut letak lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Semarang:

Tabel 2. Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Semarang Tahun 2020

No	Lokasi	Luas (Ha)
1	Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur	31
2	Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur	81,17
3	Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur	32,12
4	Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur	18,55
5	Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan	11,51
6	Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa	19,85
7	Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa	10,85
8	Desa Penawangan Kecamatan Pringapus	23,07
9	Desa Candirejo Kecamatan Pringapus	38,8
10	Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus	24,61
11	Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus	35,07
12	Desa Pringsari Kecamatan Pringapus	23,62
13	Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus	42,2
14	Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas	61,32
15	Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas	23,9

Sumber: SK Bupati Semarang Nomor 59/0473/2020

Wilayah permukiman kumuh Kab.Semarang tersebar pada 15 wilayah akan tetapi hanya dua wilayah yang mendapatkan dana bantuan untuk implementasi Program KOTAKU yaitu Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur dan Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa. Kelurahan tersebut mendapat dana bantuan program KOTAKU berdasarkan pengajuan RPLP yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang, bedanya dalam proses pelaksanaan implementasinya di Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa masih dalam proses perencanaan sedangkan di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur sudah dalam proses implementasi, untuk itu peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak.

KAJIAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang diambil pemerintah untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat dan lingkungan pemerintahan (Thomas R. Dye, dalam Inu Kencana Syafie 2010:105). Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai sebuah proses pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Wahab (dalam Andi, 2018: 22) implementasi berarti proses penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan tertentu, menimbulkan dampak dalam kegiatan tertentu. Lebih lanjut, menurut Jankins (dalam Andi,2018;24) Implementasi adalah sebuah studi yang mempelajari tentang perubahan terjadi, dan kemungkinan munculnya perubahan. Selain itu implementasi adalah studi mengenai mikro struktur kehidupan pada bidang politik, interaksi organisasi, dan motivasi yang menyebabkan mereka bertindak.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Edward III (Suratman, 2017:93) praktik implementasi didasari pada asumsi bahwa hasil output dan outcome yang dihasilkan dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan itu sendiri, semakin sistematis, efektif dan efisien implementasi kebijakan, maka akan menghasilkan output yang memuaskan. Menurut Edward III ada beberapa variabel yang menjadi penentu kebijakan, yakni: 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; 4) Struktur Organisasi.

Penelitian ini melihat implementasi dari aspek proses dan menganalisis faktor penghambat dan pendorong KOTAKU di Kelurahan Gedanganak dengan model Edward III untuk menggali pengaruh implementasi program KOTAKU dari sudut pandang pelaksana kebijakan.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program KOTAKU diatur dalam Surat Edaran Kementrian PUPR No. 40 Tahun 2016, program ini adalah program berskala nasional harus dilaksanakan dengan tepat sasaran. Program KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan di lingkungan permukiman kumuh supaya permukiman menjadi lingkungan yang layak huni. Selain memperbaiki infrastruktur sesuai dengan indikator permukiman kumuh, tujuan dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan masyarakat. Pemerintah membentuk program ini sebagai upaya untuk mengatasi perluasan lahan kumuh dan mencegah timbulnya lahan kumuh yang baru.

Penyelenggaraan Kota Tanpa Kumuh diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No 2 Tahun 2016 yang menyebutkan kriteria perumahan dan permukiman kumuh dapat ditinjau dari:

- a. Bangunan Gedung yang meliputi tingkat kepadatan bangunan, ketidakaturan bangunan dan kualitas bangunan.
- b. Jalan lingkungan yang meliputi kualitas jalan dan ketersediaan jalan lingkungan .
- c. Penyediaan air minum yang meliputi ketersediaan air minum dan terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar.
- d. Drainase lingkungan, meliputi kondisi drainase lingkungan yang tidak mengalirkan air dengan baik, tidak adanya drainase dan konstruksi drainase yang buruk.
- e. Pengelolaan air limbah yang harus sesuai dengan standar teknis, dan terdapat sarana prasarana yang memenuhi standar.
- f. Pengelolaan persampahan, harus sesuai dengan standar teknis, terdapat sarana prasarana yang memenuhi standar, serta pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana
- g. Proteksi kebakaran, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

Pelaksanaan program KOTAKU dibagi menjadi beberapa tahapan, pada seluruh tahapan terdapat kerjasama dan keterlibatan antara pemerintah, kelurahan dan masyarakat di lingkungan tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan berikut terdapat beberapa tahapan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gedanganak sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi sosialisasi dan pemetaan data baseline oleh TIPP. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk membentuk kepedulian masyarakat agar berpartisipasi dalam tahapan-tahapan program KOTAKU. TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) tingkat desa/kelurahan beranggotakan perwakilan RT/RW, TIPP dibentuk untuk membantu BKM dalam melakukan pemetaan data baseline yang terdiri dari indikator permukiman kumuh.

2) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyusunan RPLP dengan dasar yang diperoleh dari pemetaan data baseline. Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan KSM yang dibentuk oleh BKM dengan tujuan untuk membantu BKM dalam mengkoordinasikan masyarakat ketika pelaksanaan program KOTAKU berlangsung.

3) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan proses eksekusi dari perencanaan yang sudah direncanakan. RPLP merupakan acuan yang digunakan dalam tahapan pelaksanaan karena

kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sudah direncanakan dalam RPLP, kegiatan utama pada tahap ini adalah pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan baik itu pembangunan ulang ataupun perbaikan. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama saling kolaborasi antara implementor dan masyarakat setempat.

4) Tahap Keberlanjutan

Tahap keberlanjutan merupakan tahap terakhir dalam implementasi Program KOTAKU, tahapan ini dilakukan setelah pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pada tahap ini dibentuk KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) yang bertugas untuk memelihara dan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun dengan melibatkan masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dalam menjabarkan Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* dengan harapan informan dapat memberikan informasi dan menceritakan mengenai fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian sehingga data yang didapatkan tepat. Adapun informan penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Koordinator BKM Mugi Makmur Kelurahan Gedanganak, TIPP Kelurahan Gedanganak, dan masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen pendukung yang menggambarkan implementasi program KOTAKU yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak

Kelurahan Gedanganak adalah salah satu kelurahan dari 15 kawasan kumuh di Kabupaten Semarang yang memiliki luasan permukiman kumuh lebih dari 15 hektar. Kelurahan Gedanganak memiliki 11 RW, namun mayoritas pelaksanaannya hanya dilakukan di RW 1 sampai RW 6, hal itu disebabkan karena RW tersebut merupakan pedesaan dengan tingkat lingkungan kumuhnya lumayan tinggi sedangkan RW lainnya terdiri dari perumahan nasional, dan perumahan korpri. Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak tidak sesuai dengan 7 indikator kumuh melainkan hanya berfokus pada drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas air bersih karena keberjalanan program ini dilakukan berdasarkan masalah lingkungan yang ada pada wilayah tersebut.

1. Tahapan Persiapan

Sebelum pelaksanaan program KOTAKU diperlukan beberapa persiapan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program KOTAKU. Tahapan ini dilakukan untuk menjalin kerjasama antar aktor pelaksana kebijakan yakni Dinas Pekerjaan Umum, BKM Mugi Makmur, dan masyarakat lingkungan setempat. Tahapan persiapan program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak sudah terlaksana secara tepat walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam kegiatan sosialisasi. Pada tahapan ini terdiri dari 3 kegiatan yakni Sosialisasi, Pelatihan BKM, dan Update Data Kumuh.

Sosialisasi

Sosialisasi pada tahap persiapan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan BKM Mugi Makmur selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan program KOTAKU. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai Program KOTAKU, mereka menjelaskan bahwa diperlukan partisipasi aktif masyarakat di Kelurahan Gedanganak baik itu RT dan RW. Akan tetapi sosialisasi kepada BKM Mugi Makmur Kelurahan Gedanganak masih kurang rutin dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Setelah dilakukan sosialisasi kepada BKM, kemudian BKM melakukan sosialisasi kepada TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) yang terdiri perwakilan RT dan RW, yang kemudian nanti TIPP akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Faktor yang mendorong berhasilnya sosialisasi ini terletak pada peran BKM Mugi Makmur yang memberikan informasi dengan jelas kepada masyarakat. Informasi tersebut menyatukan pemahaman antara pelaksana program dan masyarakat sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan Sosialisasi dilakukan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan TIPP, BKM Mugi Makmur, dan masyarakat setempat. Informasi yang diberikan mengenai bentuk program, manfaat program, tujuan program, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU.

Pelatihan BKM

Tahapan persiapan berikutnya adalah pelatihan BKM kelurahan Gedanganak, pada kegiatan ini BKM Mugi Makmur diberikan pemahaman terhadap konsep penyediaan dan pembuatan skema perencanaan. Pelatihan ini dilakukan dengan harapan BKM dapat menguasai skema pelaksanaan program KOTAKU karena BKM merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Peran BKM Mugi Makmur adalah menjadi fasilitator program di lingkup masyarakat.

BKM Mugi Makmur di Kelurahan Gedanganak mendapatkan pelatihan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang terkait teknis pelaksanaan program KOTAKU Dalam

melaksanakan tugasnya BKM memiliki bidang sendiri untuk mengurus apapun yang berkaitan dengan lingkungan yaitu melalui Unit Pengelola Lingkungan (UPL). Pelaksanaan pemetaan lingkungan dilakukan oleh TIPP yang terdiri dari RT dan RW dan masyarakat sekitar dengan didampingi oleh UPL.

Update Baseline Data

Update data baseline adalah kegiatan selanjutnya pada tahap persiapan, update data baseline juga bisa disebut dengan data kumuh lingkungan dengan mengidentifikasi masalah lingkungan yang berkaitan pada 7 indikator kumuh seperti kondisi jalan, saluran air, drainase, pengelolaan persampahan, air bersih, dan hal yang lainnya. Update data baseline berfungsi untuk menetapkan lokasi prioritas yang akan menerima program KOTAKU. Pemetaan ini dilakukan oleh RT RW, dan masyarakat setempat dengan dampingan Unit Pengelola Lingkungan BKM.

Pendataan baseline dilakukan melalui observasi lapangan dengan melihat langsung kondisi jalan, drainase, saluran air untuk memastikan kevalidan data, kemudian data yang diperoleh akan digunakan untuk musrembang agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembangunan. Hasil dari musrembang kemudian akan membentuk RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) pada tingkat kelurahan Gedanganak yang didalam RPLP tersebut terdapat premasalahan dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.

2. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dalam program KOTAKU dilakukan untuk menyusun rencana penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Gedanganak. Faktor keberhasilan dari tahapan perencanaan ini berada pada dukungan/partisipasi masyarakat dan sikap pelaksana kebijakan dalam melakukan perencanaan program. Kegiatan pada tahapan perencanaan ini terdiri dari :

Penyusunan RPLP

Penyusunan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) diperoleh dari pemetaan lingkungan sekitar yang mengidentifikasi lingkungan berdasarkan indikator kumuh yang mencakup kondisi jalan lingkungan, penataan bangunan, saluran, drainase, air minum, pengelolaan persampahan, sanitasi dan proteksi kebakaran. Pemetaan itu dilakukan oleh BKM yang dibantu oleh perwakilan setiap RT,RW dan masyarakat sekitar. Setelah dilakukannya pemetaan tersebut, kemudian RPLP dibuat oleh BKM bersama RT dan RW yang kemudian didampingi oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan faskel.

Sebelum RPLP disahkan, maka harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan fasilitator kelurahan dan Dinas Pekerjaan Umum, dengan memastikan bahwa RPLP sudah sesuai dengan

perencanaan pembangunan. Setelah disetujui nanti RPLP akan disosialisasikan kepada masyarakat yang menjadi target sasaran, sosialisasi tersebut dilakukan oleh BKM melalui perwakilan RW dan RT. Sosialisasi tersebut dilakukan agar dapat membangun pemahaman yang sama dan mendapatkan partisipasi masyarakat untuk tahapan program selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada kegiatan ini terletak pada sikap implementor dan struktur birokrasi yang tidak berbelit belit.

Pembentukan KSM

Kegiatan berikutnya adalah pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), pihak ini bertugas untuk melaksanakan pembangunan konstruksi, dan pemeliharaan keberlanjutan. Anggota KSM di Kelurahan Gedanganak memiliki jumlah awal 20 orang, kemudian berkurang menjadi 11 orang, hingga sekarang menjadi 5 orang, meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan sisanya anggota.

KSM dipilih dari masyarakat yang berada di lingkungan tempat dilaksanakan program tersebut. Pembentukan KSM dilakukan melalui forum rapat bersama BKM, RT dan RW setempat. Anggota KSM yang terpilih biasanya harus memiliki keahlian dalam bidang pembangunan dan konstruksi, sehingga KSM dapat mengarahkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pembangunan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahapan perencanaan telah terlaksana dengan baik, faktor keberhasilan tahapan ini terletak pada disposisi dan struktur birokrasi. Sikap pelaksana kebijakan yang cepat dalam melakukan penyusunan RPLP dan pemilihan anggota KSM yang memiliki keahlian khusus sehingga memudahkan tahap berikutnya, struktur birokrasi yang dimaksud adalah proses pengesahan dari Dinas, fasilitator dan kelurahan mempengaruhi tindak lanjut program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak.

3. Tahapan Pelaksanaan

Setelah melalui tahapan persiapan dan tahapan perencanaan, kemudian akan memasuki tahap pelaksanaan, pada tahap ini dimana seluruh persiapan dan perencanaan direalisasikan. Tujuan dari pelaksanaan program adalah untuk memastikan apakah sumber daya yang ada ketika tahap persiapan program sudah mencukupi berjalannya program KOTAKU, pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan RPLP yang sudah disusun dan disahkan. Pada tahap pelaksanaan ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain :

Pencairan Dana

Pencairan dana ini berupa bantuan pemerintah untuk masyarakat yang digunakan untuk menunjang berjalannya program KOTAKU, pencairan dana tersebut didasari RPLP yang berisi

data kumuh yang diajukan oleh BKM serta kegiatan dan prosedur apa saja yang akan dilakukan menggunakan dana bantuan tersebut. Dana Program KOTAKU diperoleh apabila wilayah yang diusulkan untuk pembangunan disetujui oleh Pemerintah Pusat, pengajuan baseline data tersebut difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pencairan dana bantuan pemerintah di Kelurahan Gedanganak dikelola oleh BKM dan pencairan dana pun dilakukan secara bertahap sesuai dengan pembangunan yang dilakukan, pengajuan tersebut dilakukan setelah pembangunan mencapai target yang ditentukan, laporan pengajuan dilakukan oleh KSM untuk pengajuan dana pembangunan lanjutan, laporan pengajuan tersebut berisi laporan pengeluaran anggaran dan dokumentasi hasil pembangunan.

Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan ini dilakukan sesuai dengan perencanaan di dalam RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman). Kegiatan pembangunan infrastruktur di lingkungan Gedanganak dilakukan oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan masyarakat setempat yang didampingi oleh BKM Mugi Makmur. Pelaksanaan Program KOTAKU sangat membutuhkan partisipasi masyarakat lingkungan sekitar mulai dari pendataan wilayah kumuh, hingga kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan pada wilayah prioritas yang sudah ditentukan berdasarkan data baseline yang sudah diperoleh oleh masyarakat, pembangunan infrastruktur program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak mayoritas pada drainase, air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, dan pengelolaan persampahan, sedangkan untuk proteksi kebakaran masih belum diterapkan. Pelaksanaan program KOTAKU memang tidak sepenuhnya sesuai dengan 7+1 indikator kumuh karena berdasarkan data baseline/data kumuh permasalahan lingkungan permukiman di Kelurahan Gedanganak berfokus pada drainase, air bersih, jalan lingkungan, dan pengelolaan persampahan.

Kegiatan pembangunan/perbaikan infrastruktur di Kelurahan Gedanganak ini sudah cukup baik dan sudah tertangani, bahkan dapat mengurangi 4 hektar permukiman kumuh. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Gedanganak dilakukan sesuai data wilayah yang menjadi prioritas program KOTAKU. pembangunan/perbaikan infrastruktur dilakukan secara bertahap karena harus sesuai prosedur, sehingga terjadi transparansi anggaran yang jelas, dan penggunaan dana sesuai porsi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat sekitar sebagai sasaran dari program KOTAKU itu sendiri, untuk itu keikutsertaan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Tahapan Pelaksanaan sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa wilayah di Kelurahan Gedanganak belum mendapatkan program perbaikan.

Keberhasilan tahapan ini dipengaruhi oleh sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber daya yang dimaksud adalah anggaran, material, dan tenaga yang dibutuhkan ketika proses pembangunan infrastruktur, sedangkan disposisi dan struktur birokrasi berupa sikap pelaksana dalam melibatkan masyarakat dan standar pelaksanaan dalam pembangunan dan pencairan anggaran.

4. Tahapan Keberlanjutan

Tahap berikutnya adalah tahap keberlanjutan, pada tujuan dari tahap ini adalah monitoring evaluasi dari pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Makmur bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bertugas sebagai pelaksana sekaligus melakukan memonitoring atau mengawasi dalam tahap ini. Kegiatan pemeliharaan ini sudah tertera dalam Surat Edaran Kementerian PUPR No.40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh. Kegiatan yang dilakukan pada tahap keberlanjutan program KOTAKU sebagai berikut:

Pembentukan dan Pelatihan KKP

Peran dan tugas monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BKM, karena BKM adalah pelaksana yang paling dekat dengan lingkungan masyarakat, terdapat beberapa poin sebagai ukuran monitoring evaluasi salah satunya dengan bentuk fisik, ketepatan, dan pembentukan KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat).

KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) yang terdiri dari ketua RT dan ketua RW setempat. KPP bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun/diperbaiki di Kelurahan Gedanganak. KPP juga sempat diberikan pembekalan dan sosialisasi terlebih dahulu oleh BKM Mugi Makmur agar dapat membangun kesadaran dan motivasi untuk memelihara keberlanjutan infrastruktur di lingkungan mereka.

Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Kegiatan ini dilakukan pasca tahapan pelaksanaan dengan tujuan agar infrastruktur yang diperbaiki/dibangun dapat dimanfaatkan dan berfungsi dengan baik. Walaupun sudah dibentuk KPP, kegiatan ini juga tetap membutuhkan partisipasi masyarakat sekitar, kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi yang dilakukan oleh KPP yang dimonitoring langsung oleh BKM Kelurahan Gedanganak. kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab masyarakat dengan koordinasi dari KPP di lingkungan sekitar. KPP akan melaporkan kegiatan pemeliharaan secara rutin setiap bulannya. Pemeliharaan dapat berupa kerja bakti bersama untuk membersihkan saluran drainase,

Pemanfaatan dari perbaikan infrastruktur sudah dirasakan oleh masyarakat setempat seperti perbaikan jalan yang membuat warga lebih mudah untuk melakukan mobilisasi, dibangunnya drainase dan saluran air sehingga air kiriman dari wilayah lain saat hujan turun tidak menyebabkan banjir, pembangunan pembangunan fasilitas sarana air bersih seperti sendang, sumur, dan pipa air memudahkan warga untuk mendapatkan air bersih.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pada tahap keberlanjutan sudah dilakukan dengan baik akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah, mereka masih membuang sampah sembarangan, dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti rutin. Keberhasilan tahapan ini dipengaruhi oleh Sumber daya manusia, komunikasi dan disposisi. Sosialisasi dan ajakan kerja bakti sudah dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian kepada kebersihan lingkungan akan tetapi ada beberapa warga yang kepeduliannya terhadap lingkungan masih rendah.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi KOTAKU di Kelurahan Gedanganak

1. Komunikasi

Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak melibatkan berbagai pihak yang meliputi masyarakat, BKM Mugi Makmur, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan pada implementasi program KOTAKU di Gedanganak ini sudah cukup baik, namun ada beberapa yang kurang yakni sosialisasi rutin yang dilakukan oleh DPU terhadap BKM, akan tetapi sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan BKM Mugi Makmur terhadap masyarakat Kelurahan Gedanganak sudah cukup baik, sosialisasi dilakukan melalui perwakilan RT dan RW.

Komunikasi tidak hanya dilakukan pada kegiatan sosialisasi program saja, kegiatan kegiatan lainnya juga memerlukan proses komunikasi yang baik terutama pada tahapan pelaksanaan, dan tahapan keberlanjutan. Pada tahapan pelaksanaan dibutuhkan komunikasi yang baik antara BKM, KSM, masyarakat dan pihak pihak yang berperan pada tahapan pelaksanaan. Komunikasi yang baik diperlukan agar pembangunan infrastruktur pada tahapan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan teknis yang direncanakan sehingga pengeluaran anggaran, dan waktu pembangunan sesuai dengan rencana.

Pentingnya komunikasi pada tahapan keberlanjutan juga mempengaruhi keberhasilan tahapan tersebut. Tujuan dari komunikasi adalah menyamakan pemahaman dan tujuan agar kebijakan/program dapat terlaksana dengan baik. Proses komunikasi yang baik pada tahapan

keberlanjutan akan membentuk pemahaman masyarakat setempat untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur yang sudah diperbaiki melalui program KOTAKU. Sehingga komunikasi juga dapat memberikan pengaruh terhadap partisipasi dan kesadaran masyarakat sebagai sasaran program ini.

2. Sumber Daya

Terlaksanannya sebuah program/kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, material, dan waktu. Untuk itu sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi program/ kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa sumber daya yang berkaitan dengan implementasi program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak yaitu sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat, dan para pelaksana kebijakan, sumber daya berupa anggaran bantuan pemerintah dan swadaya masyarakat.

Untuk sumber daya manusia yang meliputi masyarakat dan pelaksana kebijakan dinilai sudah cukup baik dalam tahapan pelaksanaan program KOTAKU, namun kesadaran masyarakat atas pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun/diperbaiki pada tahap keberlanjutan masih kurang Untuk sumberdaya material diperoleh melalui swadaya masyarakat, dan pencairan dana bantuan pemerintah.

Pada dasarnya masyarakat berperan sebagai sasaran dan pelaku utama karena pada program ini dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat, maka keberjalanan program untuk mencapai tujuan akan sulit dicapai. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara infrastruktur dan pencairan dana faktor yang menghambat pelaksanaan program KOTAKU terutama dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan keberlanjutan.

Ketika update data baseline pada tahapan persiapan membutuhkan sumber daya manusia baik itu dari BKM, faskel, dan masyarakat setempat, dalam pemetaan data tersebut dilakukan observasi dengan menggunakan indikator permukiman kumuh. Kegiatan tersebut harus terlaksana dengan baik karena dapat mempengaruhi pelaksanaan tahapan berikutnya. Pada tahapan pelaksanaan terutama dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan, sumber daya tersebut berupa anggaran dan tenaga, untuk jika kebutuhan sumber daya tidak tercukupi maka akan menghambat pelaksanaan program KOTAKU.

3. Disposisi

Disposisi pada pengaruh implementasi kebijakan dilihat melalui sikap pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan menjadi faktor yang berpengaruh penting bagi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian implementasi KOTAKU di Kelurahan

Gedanganak menunjukkan adanya keterkaitan dan kerja sama antara implementor dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat melalui swadaya yang dilakukan masyarakat dan keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan implementasi program KOTAKU, yang menunjukkan sikap persuasif implementor untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program KOTAKU.

Terdapat beberapa kegiatan yang keberhasilannya dipengaruhi oleh sikap dan dukungan pelaksana program terutama kegiatan sosialisasi, pembentukan KSM dan KPP, dan kegiatan pembangunan. Bentuk sikap pelaksana program yakni sikap persuasif para implementor untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelaksanaan program KOTAKU.

4. Struktur Birokrasi

Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak dilaksanakan oleh BKM Mugi Makmur sebagai lembaga masyarakat yang kepengurusannya disusun berdasarkan pemungutan suara oleh masyarakat. Program KOTAKU dilaksanakan dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat setempat agar dapat membantu BKM dalam mengkoordinasi masyarakat. Struktur birokrasi banyak mempengaruhi keberjalanan program KOTAKU terutama dalam kegiatan penyusunan RPLP hingga pengesahan, dan pencairan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM). Mekanisme birokrasi akan menghambat pelaksanaan Program KOTAKU jika birokrasi berbelit-belit dan proses pengurusannya yang lama.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak dilakukan melalui beberapa tahapan yakni tahapan persiapan, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan keberlanjutan. Pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi keberjalannya program seperti kurangnya sosialisasi, pendanaan yang terlambat, dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak adalah komunikasi, keterlibatan masyarakat, dan ketersediaan sumberdaya. Hal tersebut dapat dilihat ketika masyarakat ikut bekerjasama melakukan pembangunan, pendataan baseline, penyusunan RPLP, dan pemeliharaan.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni pada tahapan persiapan sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi secara rutin kepada BKM Mugi Makmur, walaupun proses sosialisasi BKM ke masyarakat bisa dibilang lancar, alangkah baiknya sosialisasi kepada BKM dilakukan dengan maksimal. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan proses pencairan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat bisa dipercepat, menurut keterangan yang disampaikan narasumber (Koordinator TIPP). Dana pembangunan cair pada saat musim hujan sehingga mempengaruhi target waktu pelaksanaan pembangunan, yang sudah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik. Bogor: Ghalia Indonesia

Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta
Kabupaten Semarang Dalam Angka 2021

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Caps

E-Journal

Abidin, Zaenal. 2019. Implementation Of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Programs To Enhance The Community Welfare In Malang City, East Java, Indonesia. Departement of Social Welfare Science, Faculty of Social Science and Political Science, Unviersity of Muhammadiyah Malang.

Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Ali, F, dan Alam, A.S. 2012. Studi Kebijakan Pemerinta. Bandung: Refika Aditama.

Askari MH dan K Gupta. 2016. Changes in Socio-Economic and Health Condition of Rehabilitated Slum Dwellers in Kolkata, West Bengal. International Journal Hum. Capital Urban Manage. No.2. Hal: 177-122.

Ayuningtyas Istiqomah dan Artiningsih. 2019. Evaluasi Metode Verifikasi Lokasi dan Pemutakhiran Profil Permukiman Kumuh dalam Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Jurnal Geografi. No. 2. Hal: 79-92.

Balbim Renato dan Cleandro Krause. 2019. Slum Upgrading in Brazil: Lessons from Evaluation Processes. Journal of Ci& Trop. Recife. No. 43. Hal: 185- 201.

Efridawati dan Anggraeni Atmei Lubis. 2015. Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deli Serdang. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. No. 1. Hal: 58-70

- Fadillah, Putra. 2003. *Paradigma Kritis dalam Study kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghufrony, Ahmad, dan Imam Darul F. 2018. Program Kota Tanpa Kumuh (Kegiatan Diskusi dan Refleksi Konsep Pembangunan Yang Berkeadilan. Laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat Penunjangn Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintah dan Pembangunan
- Hadi, Ahmad,dkk. 2020. Policy Networks in the Implementatuon of Cities Without Slums Program in Baleendah District, Bandung Regency. *Public Administration Journal*
- Imelda, Stevani dan Titik Djumiarti. 2019. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Jurnal Administrasi Publik*
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gava Media
- International Journal of Political Science (IJPS)*. No. 1. Hal: 10-13.
- Krisandriyana Maresty, dkk. 2019. Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta. *Jurnal Desa-Kota*. No. 1. Hal: 24-33.
- Lestari, Indah Dwi dan Agung Sugiri. 2013. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman KUmuh di Podosugih Kota Pekalongan. *Jurnal Teknik PWK*. No. 1. Hal: 30-41.
- Miranda, Ade dan Dr. Zahratul Idami, S.H, M Hum. 2019. Analysis Of City Policy Implementation Without The Slum Ministry Of Public Work And Housing in Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, Vol.4 No.4.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nur, Ika R, dan Nina Widowati. 2019. Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*
- Nurhasanah. 2019. Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*. No.1. Hal: 58-70.
- Ramdhani Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. No.1. Hal:1-12.
- Rani, Eliza dan Hartuti Purnaweni. 2019. Implementasi Program KOTAKU dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*

- Ratnasari, Dwi Jayanti dan Asnawi Manaf. 2015. Tingkat Keberhasilan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi kasus: Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan). *Jurnal Pengembangan Kota*. No. 1. Hal: 40-48.
- Ruli As'ari dan Siti fadjarani. 2015. Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi*. No. 1. Hal: 56-67.
- Setyati, Rini dan Warsito Utomo. 2015. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. No. 1. Hal: 59-72.
- Sitorus, Herta, Retno S dan Hartuti P. 2020. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.. *Jurnal Administrasi Negara Vol 8, No 1*, 74-94
- Sulistyaningsih, Tri, dkk. 2019. The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums Program (KOTAKU) in Pasuruan, Indonesia. *Archives in Social Science, Education, and Humanities Research*. Volume 436.
- Suratman, 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Capiya Publishing
- Swami, Kumar S. 2017. *An Empirical Study of Growth of Slum Population in India*.
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thribuwana, Awilya dan Ohan Farhan. 2020. Performance Indicators of Basic Infrastructure of KOTAKU Program (The City Without Slums). *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*.
- Wahab, Solichim Abdul, 2010. *Anilisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksar
- Wijaya, Doni Wahyu. 2016. Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. No. 1. Hal: 1-10.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yokyakarta: Media Pressindo.
- Yuliani, Sri dan Gusty Putri D R. 2017. Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2*, 2017 hlm 33-47

Yuliani, Sri dan Gusty Putri Dhini Rosyida. 2017. Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Jurnal Wacana Publik. No. 2. Hal: 33-47.

Dokumen

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.
Surat Keputusan Bupati Semarang No 59/0473/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Semarang